

Subjek	:	1. PEMERINTAHAN DAERAH
Abstrak		abstrak (A) Nama : Anton Sudanto NIM : 207081018 (B) ? Analisis Hukum Terhadap Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah? (C) vi + 145 halaman + lampiran, 2012 (D) Kata kunci : Pemilihan Umum, Calon Independen, (E) Isi Abstrak Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menjadi landasan hukum Pilkada langsung yang merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Calon Independen yang dapat berkompetisi dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme pilkada tanpa mempergunakan partai politik sebagai media perjuangannya. Permasalahan dalam tesis ini adalah implementasi dan kewenangan menyeluruh mengenai Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 menurut UU No. 12 Tahun 2008 dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari calon independen. Metode Penelitian dalam tesis ini yaitu berdasarkan penelitian normatif. Hasil analisa penulis yaitu Kewenangan MK dalam pengujian Undang-Undang telah memberi kewenangan kepada MK untuk menguji/judicial review produk hukum (Undang- Undang) yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan negara legislative yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945). Analisis Hukum tentang Calon Independen dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012 adalah dengan memakai dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, ?Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, dengan tidak ada kecualinya?, serta Pasal 28D Ayat (3) menyatakan, ?Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ? Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan pilkada melalui independen dan partai politik adalah sebagai berikut Peraturan Perundangan Pilkada, Keterbatasan Waktu Persiapan Pilkada, Desk Pilkada, Money Politics dalam Pilkada (F) Daftar acuan : 53 Buku, 4 Peraturan Perundangan dan 7 Internet (G) Pembimbing : Dr. Dwi Andayani Bs., S.H., M.H., (H) Penulis : Anton Sudanto